

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pendidikan Politik merupakan sebuah pendidikan yang sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberlangsungan roda bernegara. Karena politik merupakan sebuah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Akan tetapi pendidikan politik ini masih sangat diacuhkan oleh elemen masyarakat, oleh sebab itu banyak nya masyarakat yang apatis terhadap dunia politik, dan menganggap bahwa politik itu adalah hal yang buruk dan kotor. Dari pandangan yang salah terhadap politik inilah yang membuat tingkat demokrasi di Indonesia ini tidak baik, karena demokrasi akan terwujud apabila adanya sebuah proses politik yang baik juga, karena gerbang utama untuk terwujudnya negara demokrasi adalah melalui proses politik yakni pemilihan umum (Pemilu).

Menurut Mulyadi & Anyan (2019) Pendidikan politik memiliki peran yang besar untuk dapat mengantarkan para siswa agar dapat menjadi seorang warga negara yang baik karena warga negara yang baik adalah mereka yang menyadari akan hak serta kewajibannya juga tidak hanya pada titik menyadari saja, tetapi juga bagaimana warga negara dapat mengimplementasikan hak serta kewajibannya tersebut dengan ikhlas disegala elemen kehidupan mulai dari skup yang terkecil yakni pada diri

sendiri juga keluarga maupun pada skup yang lebih besar lagi yakni pada ranah masyarakat dan negara.

Pendidikan politik memiliki peranan sangat besar dalam memberikan pengetahuan mengenai politik secara umum dan pemilu secara khususnya. Pendidikan politik seharusnya sudah diberikan kepada masyarakat Indonesia sedari pendidikan formal. Pendidikan politik dalam pemberian melalui pendidikan formal dapat disampaikan melalui wadah pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) banyak membahas hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara juga permasalahan-permasalahan dalam berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini cukup cocok apabila dapat dibarengi dengan pemahaman-pemahaman politik terhadap siswa.

Pendidikan politik ini dapat diberikan melalui beberapa wadah, bisa melalui keluarga, desa, organisasi, dan sekolah. Muhammadiyah merupakan salah satu Civil Society Organization yang juga salah satu konsen ranah geraknya pada bidang pendidikan. (Abidin, 2014) konsep yang populer mengenai civil society dikemukakan oleh Tocqueville yang merupakan filsuf pada bidang sejarah dan politik di Prancis yaitu perkembangan civil society dapat menguat disebabkan oleh dukungan organisasi keagamaan yang cukup plural di Amerika. Tocqueville dalam hal ini menandakan bahwa pada penguatan asosiasi atau organisasi yang

independen di dalam masyarakat untuk dapat mengembangkan jiwa demokrasinya. Sedangkan di Indonesia pada umumnya konsep civil society dipaparkan dengan menggunakan karakteristik tertentu, seperti yang dimaksud oleh Hikam (2015) dimana civil society merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial berbentuk organisasi dan mempunyai ciri-ciri yaitu; keswasembadaan, kesukarelaan, keswadayaan, mempunyai kemandirian apabila dihadapkan dengan negara, dan juga mempunyai keterikatan norma hukum yang diikuti oleh anggotanya.

Menurut seorang ekonom yakni Dawam Rahardjo dalam (Anggara et al., 2021), konsep dari *civil society* ini memiliki beberapa karakteristik, yang pertama adalah berbentuk sebuah organisasi yang sukarela. Karakteristik yang kedua adalah organisasi *civil society* tersebut yang memiliki tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat secara umum. Ketiga adalah berdiri secara mandiri serta dapat mengatur dirinya sendiri juga dapat memiliki sebuah rasionalitas.

Masyarakat dalam hal ini menjadi dapat menjadi pengawas yang mengawasi setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh penguasa politik ataupun oleh negara, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini mempunyai sifat terbuka bagi siapa saja yang mempunyai pandangan yang berbeda dan mau untuk memberikan kritikan atau saran kepada negara atau penguasa politik karena masyarakat dapat dikatakan menjadi masyarakat yang mandiri apabila mereka tidak hanya mengikuti setiap kebijakan yang menguntungkan pihak penguasa politik saja, tetapi mereka

masyarakat juga dapat memberikan pendapatnya sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Masyarakat bebas untuk dapat berekspresi, seperti bebas untuk menyuarakan pendapat, bebas untuk berorganisasi, dan bebas untuk berkumpul.

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Civil Society yang berdiri pada tanggal 18 November 1912 yang pada perjalanannya hingga saat ini yang sudah memasuki usianya yang satu abad lebih Muhammadiyah sudah bergerak di berbagai ranah kehidupan. Pada perkembangan gerakan Muhammadiyah ini memang sudah diawali dengan sebuah konsep yang dicetuskan oleh *Founding Father* Muhammadiyah yakni pada Teologi Al-Maun. Menurut Gunawan (2018) Teologi Al-Maun ini memiliki landasan pada kitab Al-Qur'an yang ditafsirkan kepada tiga pokok utama, yakni: *Healing* pada poin *Healing* ini dapat diartikan sebagai sebuah ranah yang bergerak pada bidangt pelayanan kesehatan, pada poin *schooling* memiliki arti serta ranah geraknya pada sektor pendidikan, juga *feeding* dapat diartikan pemberian makanan atau yang lebih luas lagi pada ranah gerak Muhammadiyah pada poin *feeding* ini adalah pemberian pelayanan sosial. Pada konsep teologi Al-Maun ini yang disinyalir mampu memberikan kekuatan yang membuat organisasi Muhammadiyah ini dapat bertahan hingga saat ini yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun bahkan pada ranah pendidikan Muhammadiyah kini sudah menjelma menjadi sebuah organisasi yang memiliki lembaga pendidikan mulai dari pendidikan paling awal yakni Paud, TK, hingga memiliki lembaga pendidikan tingkat

Universitas yang bahkan hingga ranah doktoral. Tidak ketinggalan pula pada poin *Healing* dan *Feeding* juga bergerak dengan memiliki ribuan rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lain.

Muhammadiyah merupakan salah satu *Civil Society Organization (CSO)* yang sudah berdiri cukup lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka Muhammadiyah sudah turut membantu masyarakat Indonesia untuk terbebas dari kebodohan. Hingga saat ini Muhammadiyah masih terus melebarkan sayap dakwahnya pada ranah pendidikan seperti yang disebutkan oleh Nurzana (2017) Muhammadiyah memiliki jumlah Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) 2.604, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1.772, serta Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA) 1.143, Pondok Pesantren 67, Perguruan Tinggi Muhammadiyah 172. Sebagai *Civil Society Organization (CSO)* yang salah satu ranah geraknya pada pendidikan Muhammadiyah sudah seharusnya turut memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat Indonesia. Dengan jumlah sekolah yang cukup banyak Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk dapat mencerdaskan masyarakat Indonesia dari stigma-stigma negatif terhadap politik.

Korelasi antara Muhammadiyah dengan politik memang bukan merupakan sebuah hal yang baru, walaupun memang Muhammadiyah sendiri bukan merupakan organisasi politik, tetapi tercatat dengan jelas dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) bahwa

dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara warga Muhammadiyah memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengambil bagian serta tidak boleh apatis terhadap politik. Meski demikian politik yang ditafsirkan oleh Muhammadiyah ini adalah politik moral bukan politik secara praktis, karena memang semenjak kelahirannya Muhammadiyah menegaskan bahwa secara organisatoris Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah non politik. Tetapi peran dari Muhammadiyah yang sangat menonjol hingga saat ini adalah merepresentasikan posisi Muhammadiyah sebagai civil society organization. (Argenti, 2017)

Muhammadiyah sendiri sudah sedari berdirinya sudah banyak memberikan andil dalam ranah politik kewarganegaraan. Walaupun Muhammadiyah memang bukan merupakan organisasi politik praktis tapi cukup banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang turut memberikan pemikiran politik di Indonesia. Seperti yang disebutkan oleh Sadikin (2019) kontribusi pemikiran politik dari tokoh Muhammadiyah sudah dipupuk dari mulai pendirinya yakni K.H.Ahmad Dahlan pada masa kolonial Belanda, pada masa kependudukan Jepang tokoh intelektual Muhammadiyah juga turut memberikan andil besar dalam memberikan pemikirannya mengenai politik dan kewarganegaraan yakni Mas Mansur, Jenderal Soedirman pun juga memberikan andil yang sangat besar dalam dunia politik kewarganegaraan, perlu digaris bawahi juga bahwa Jenderal Soedirman merupakan tokoh Muhammadiyah yang juga memiliki salah satu kalimat yang masih diingat oleh kader-kader hingga saat ini yakni “Menjadi kader Muhammadiyah itu

berat, jika ragu dan bimbang lebih baik pulang”.

Korelasi antara Muhammadiyah dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila juga sangat dekat, bahkan Muhammadiyah melalui tokoh-tokoh pemikirnya turut serta berkecimpung dalam proses perumusan dasar negara tersebut. Disebutkan dalam Kusumawati (2019) bahwa beberapa tokoh penting Muhammadiyah turut serta dalam perumusan Pancasila, setidaknya ada tiga tokoh dari Muhammadiyah yang turut serta yakni Ki Bagus Hadikusumo, Prof.Kahar Muzakir dan juga Mr. Kasman Singodimenjo mereka bersama beberapa tokoh lainnya memiliki andil secara langsung pada Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Meski dalam perjalanan Pancasila mengalami beberapa perubahan kekuatannya seperti salah satunya Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal untuk semua organisasi. Hingga pada akhirnya pada beberapa tahun terakhir ada sebuah gagasan bahwa Pancasila merupakan *darul ahdi wa al-syahadah*. Sudut pandang Pancasila sebagai darul ahdi wa al-syahadah ini memiliki setidaknya tiga latar belakang utama. Yang pertama adalah masih banyaknya kelompok-kelompok yang masih mempertanyakan dan mempermasalahkan korelasi antara Islam dengan negara dan juga mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedua adalah adanya sebuah realitas bahwa negara ini belum memiliki sebuah ideologi yang dirumuskan secara eksplisit dan membuat sebuah pedoman akademik tentang negara Pancasila. Ketiga adalah adanya sebuah realitas yang

menganggap bahwa umat Islam diposisikan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara Pancasila. (Susana, 2019)

Pendidikan politik yang masih rendah membuat pemilih pemula ini sangat rentan untuk digunakan sebagai sasaran propaganda politik yang nantinya akan dimobilisasi oleh kepentingan tertentu. Apabila melihat ke pengalaman masa lalu, misalnya Pemilih Pemula ini diarahkan ke salah satu pasangan calon dengan kargo atau jargon tertentu, baik melalui perang iklan dan media sosial tanpa kehadiran pemahaman mendalam tentang mengapa mereka harus memilih pasangan calon. Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga tidak memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan di mana mereka harus memilih. Jadi, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Selain itu praktik politik uang dimasa sekarang juga mulai bertransformasi juga, yang dulu mungkin praktik money politik ini hanya dilakukan melalui pintu ke pintu dipagi hari, sehingga sering disebut juga dengan serangan fajar sekarang semakin parah dengan terang-terangan, salah satunya adalah contoh pada tahun 2019 banyak peserta pemilu yang memberikan promo melalui platform belanja online. Bagi yang tidak terlalu mengkaji pasti menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar, tetapi apabila dikaji lebih dalam lagi hal tersebut merupakan sebuah propaganda yang disebarkan oleh peserta untuk mempengaruhi pilihan. Inilah alasan mengapa pemilih pemula sangat rentan terhadap dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan politik material untuk kepentingan partai politik.

Ketidaktahuan dalam politik praktis, terutama dengan pilihan dalam pilkada atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikirrasional dan lebih mementingkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya digunakan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politik mereka Misalnya, digunakan untuk pertemuan massa dan pembentukan organisasi partai.

Pada Kapanewon Bantul sendiri merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Bantul yang tentunya letak geografisnya sangat mudah untuk dijangkau. Sebagai Civil Society, Muhammadiyah sendiri memiliki tiga Sekolah Menengah Atas sederajat diKapanewon Bantul, dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Oleh karena itu sudah seharusnya Muhammadiyah memerankan perannya sebagai Civil Society yang salah satu ranah geraknya pada pendidikan untuk membantu memberikan pendidikan politik melalui pendidikan formal. Karena terbukti bahwa pendidikan politik melalui pendidikan formal yakni Sekolah Menengah Atas memiliki peranan yang cukup signifikan, seperti yang disebutkan Sari, N. S. (2019) bahwa dalam Pemilu 2019 partisipasi siswa di Kapanewon Bantul mencapai 60,3%.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini merumuskan bahwa permasalahannya adalah pentingnya pemahaman politik kepada seluruh warga negara terlebih kaum muda, maka

dari itu diperlukannya pendidikan politik dari dini agar terbentuk mindset yang lurus terhadap politik. Sehingga dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah

1. Bagaimana pendidikan politik yang diberikan kepada siswa SMA dan SMK Muhammadiyah se-Kapanewon Bantul?
2. Bagaimana pengaruh dari pendidikan politik terhadap ketertarikan politik kepada siswa?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diselesaikan untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat dari penulisan tersebut adalah:

1. Untuk melihat bagaimana pendidikan politik yang diberikan kepada siswa SMA dan SMK Muhammadiyah se-Kapanewon Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pendidikan politik terhadap ketertarikan politik kepada siswa.

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang berfokus pada penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, berikut merupakan manfaat penelitiannya

1. Manfaat untuk penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan sistematis.
2. Manfaat bagi pembaca, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pentingnya pengetahuan politik kepada seluruh elemen masyarakat, karena apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman politik yang baik maka akan makin banyak masyarakat yang akan termakan propaganda-propaganda yang kotor dari politisi
3. Manfaat secara praktis, diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak terkait dalam pentingnya pemahaman politik bagi seluruh elemen masyarakat terlebih kepada siswa.

1.5.Kajian Teori

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) ini memiliki tujuan agar siswa yang berposisi sebagai pemilih pemula dapat mengetahui politik melalui pendidikan kewarganegaraan. Teori yang digunakan adalah Teori Perilaku Pemilih. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan diperkuat dengan hasil penelitian yang relevan. Kesimpulan dari penelitian Rahman (2018) adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan sangat besar dalam meningkatkan kesadaran mengenai partisipasi pemilih pemula dalam kontestansi pemilu. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat pendidikan politik melalui

Pendidikan Kewarganegaraan hanya saja dalam penelitian ini lebih melihat dari perspektif Civil Society.

Penelitian yang dilakukan oleh Triono (2017) yang berjudul Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik memiliki tujuan untuk melihat pentingnya pendidikan politik dalam melangsungkan pemilu guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian Triyono (2017) ini adalah bahwa kesadaran tentang partisipasi masyarakat akan muncul dengan sendirinya apabila adanya sebuah pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendidikan dan sosialisasi politik secara terprogram dan terstruktur kepada masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini fokus pembahasan lebih kepada upaya pendidikan serta sosialisasi politik melalui Sekolah Muhammadiyah yang seharusnya memiliki perspektif dari civil society.

Pahlevi & Amrurrobi (2020) dalam penelitian yang berjudul Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa membahas secara garis besar mengenai pentingnya pendidikan politik guna untuk mencegah maraknya politik uang. Metode yang digunakan dalam penelitian Pahlevi & Amrurrobi (2020) ini adalah Metode Kualitatif. Penelitian ini memiliki dua hasil, yang pertama adalah pendidikan politik dengan metode per-emptif yang diberikan kepada

masyarakat Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai efektif karena masyarakat sadar bahwa *money politic* adalah bagian dari suap. Hasil yang kedua adalah konsep preventif yang mana menyediakan posko aduan bagi yang melihat transaksi politik uang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi & Amrurrobi (2020) lebih terfokus pada pentingnya pendidikan politik guna untuk mencegah maraknya politik uang, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan mengenai bagaimana pendidikan politik yang dilakukan oleh SMA dan SMK Muhammadiyah melalui wadah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penelitian yang berjudul Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi Negeri (Ramdhani, 2019) memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan kurikulum pada setiap perguruan tinggi negeri tentang pendidikan politik, sehingga dapat mengetahui gambaran terkait pendidikan politik diperguruan tinggi negeri. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan model yuridis normatif dengan hasil menunjukkan bahwa perbedaan pendidikan politik di tiga perguruan tinggi negeri yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Pendidikan Indonesia terletak pada materi pembelajaran pendidikan politik. Perbedaannya adalah pada melakukan perbandingan antara satu universitas dengan universitas yang lain pada pendidikan politik uang diberikan sedangkan dalam penelitian ini tidak melakukan perbandingan antara sekolah satu dengan yang lain, tapi untuk melihat dari setiap Sekolah

Menengah Atas ataupun Sekolah Menengah Kejuruan sudah sejauh mana memberikan pendidikan politik kepada para siswa.

Rahman & Suharno (2020) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi pada kepala sekolah, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan juga siswa Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Rahman & Suharno (2020) menyebutkan bahwa dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta ada faktor yang mendukung serta ada juga faktor penghambatnya. Ada tiga faktor pendukung terlaksananya pendidikan politik kepada siswa yakni fasilitas dari sekolah yang memadai untuk pemberian pendidikan politik, yang selanjutnya adalah organisasi siswa intra sekolah juga sangat mendukung untuk pemberian pendidikan politik kepada siswa sekolah. Karena justru pada ranah organisasilah laboratorium politik dibangun untuk saling mengasah kemampuan dialektik dan lain sebagainya. Faktor pendukung yang terakhir adalah ekstrakurikuler.

Sedangkan pada faktor penghambat ada tiga poin juga, yang pertama adalah kurangnya fasilitas sekolah yang mendukung terlaksananya pendidikan politik kepada siswa. Selanjutnya adalah sangat minimnya sosialisai mengenai politik kepada siswa dari instansi yang terkait, hal tersebut sangat menjadi penghambat dikarenakan tidak adanya pengetahuan

dari praktisi dilapangan kepada siswa sehingga siswa hanya dapat mendapatkan materi sebatas teoritis saja, untuk dari segi keadaan dilapangan masih sangat kurang. Terakhir adalah sangat sedikit contoh baik yang diberikan oleh elit politik pada tataran nasional, hal ini sangat memberikan hambatan dikarenakan banyak siswa yang apatis karena melihat bagaimana elit-elit politik yang bertindak.

Penelitian yang dilakukan oleh Haerul, I. (2019) ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana andil dari Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas 10 di MA ALMUTHMAINNAH. Dalam penelitiannya Haerul, I. (2019) menyebutkan bahwa ada beberapa elemen yang memiliki peranan penting untuk memberikan pendidikan politik terhadap siswa yang salah satunya adalah Guru dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Siswa dapat memperoleh pendidikan politik dari guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik siswa, hal ini ditandai dengan siswa dapat memiliki pemahaman, sikap, serta perilaku politik. Peningkatan pemahaman siswa mengenai politik ini juga dapat ditandai dengan berpartisipasinya siswa dalam proses pemilihan ketua organisasi intra sekolah serta turut aktifnya siswa dalam berproses dalam organisas-organisasi didalam sekolah. Karena pada sejatinya dalam proses berorganisasi juga merupakan proses dalam berpolitik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik

melalui pendidikan formal memiliki peranan yang cukup besar untuk meningkatkan kesadaran politik.

Alkautsar & Suharno (2021) melakukan penelitian yang berjudul Pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh Muhammadiyah dalam rangka menyiapkan civil society, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan tujuan mempersiapkan civil society. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan pada kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pendidikan politik yang dilakukan Muhammadiyah untuk pemilih pemula untuk mempersiapkan civil society ini dilakukan melalui dua ranah, yakni melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam hal ini melalui sekolah-sekolahan milik Muhammadiyah dan melalui organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah.

Dalam proses pemberian pendidikan politik ini menggunakan beberapa metode yang pertama menggunakan metode seminar mengenai politik, walupun Muhammadiyah bukan organisasi yang bergerak pada ranah politik praktis tetapi Muhammadiyah tetap berpolitik secara moral. Selain seminar dapat juga diberikan secara diskusi-diskusi, pelatihan di internal kader Muhammadiyah. Disisi lain pemberian pendidikan politik ini juga bisa dilakukan dengan cara praktek dilapangan seperti menjadi pengawas pemilu dan lain sebagainya.

Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, Muhammadiyah Movement from the Civic Education Perspective (Sadikin, 2019) memiliki tujuan adalah untuk melihat sejauh mana kontribusi Muhammadiyah melalui segi pemikiran politik intelektual guna untuk meningkatkan demokrasi dan juga kewarganegaraan melalui perspektif pendidikan kewarganegaraan dengan metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan rancangan etnografi. Hasil dari penelitian Sadikin (2019) ini adalah Penelitian ini menghasilkan Muhammadiyah memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan rumusan mengenai konsep pendidikan guna untuk membangun warga negara yang lebih demokratis. Kewajiban tersebut adalah bentuk dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun hingga saat ini Muhammadiyah masih belum memiliki keseriusan untuk menciptakan warga negara yang bermutu yang selaras dengan tuntutan realitas yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Perbedaan dengan penelitian (Sadikin, 2019) adalah dalam penelitian ini tidak hanya menitik beratkan pada pendidikan kewarganegaraan saja tetapi juga melihat bagaimana posisi dari Muhammadiyah sebagai Civil Society.

(N. E. Putri & Mubarak, 2020), Influence of Political Literacy on the Political Participation of Beginner Voters in Regional Elections. Penelitian yang dilakukan oleh N. E. Putri & Mubarak, (2020) memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh informasi politik terhadap partisipasi politik, khususnya partisipasi pemilih pemula. Metode yang digunakan adalah

metode kualitatif dengan kesimpulan bahwa desain literasi politik yang efektif terhadap pemilih pemula melalui efektivitas organisasi serta literasi politik pemula yang efektif akan meningkatkan jumlah partisipasi pemilih secara objektif dan rasional.

Argenti (2017) dalam penelitian yang berjudul *Civil Society dan Politik Moral Muhammadiyah* memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana andil yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang berdiri sebagai kekuatan civil society yang bersifat otonom pada masa pasca reformasi. Metode yang digunakan Argenti (2017) adalah kualitatif deskriptif dengan adanya sebuah metode menganalisis data yang kemudian disajikan berupa narasi sebuah fenomena politik yang terjadi bukan disajikan dalam bentuk statistik. *Civil Society dan Politik Moral Muhammadiyah* menghasilkan bahwa pada masa pasca reformasi organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah memiliki andil yang cukup signifikan sebagai kekuatan civil society dalam kontestansi politik pada skala nasional.

Walaupun Muhammadiyah dalam memainkan politik tersebut tidak melakukan politik secara praktis tetapi Muhammadiyah tetap memiliki andil besar dalam politik Nasional melalui politik moral. Beberapa contoh peran Muhammadiyah pada politik nasional adalah Muhammadiyah memberikan usulan kepada legislatif mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP). Persamaan penelitian Argenti (2017) dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat bagaimana Muhammadiyah memainkan perannya sebagai civil society dalam ranah

politik, namun juga memiliki perbedaan yang mana pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada peranan Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan politik sebagai civil society.

Muhammadiyah memiliki kiprah yang cukup banyak dalam ranah Pancasila, Politik, dan Kewarganegaraan, Kusumawati (2019) menuliskan bahwa Muhammadiyah menempatkan negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*. Berbeda dengan beberapa organisasi masyarakat Islam yang berpendapat bahwa Pancasila dan Agama Islam adalah dua komponen yang berbeda, Muhammadiyah justru memiliki pandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila merupakan sebuah bentuk negara yang cukup ideal oleh karena itu Muhammadiyah sepakat untuk terus dipertahankan.

Muhammadiyah sebagai sebuah elemen yang tidak bisa dibisahkan dari bangsa juga masyarakat Indonesia selalu melakukan usaha untuk membentuk Negara Indonesia yang berkemajuan sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dibuktikan Muhammadiyah turut serta memberikan bantuan kepada Negara Indonesia dari berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, juga dalam ranah kesejahteraan. Kusumawati (2019) dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga memiliki persamaan dengan penelitian ini adalah melihat bagaimana peranan Muhammadiyah dalam membangun negara Indonesia.

Parmudi (2015) menuliskan sebuah jurnal yang berjudul Kebangkitan Civil Society di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengimajinasikan bagaimana proses bangkitnya Civil Society di Indonesia yang dalam bangkitnya tersebut dipengaruhi oleh berbagai sektor salah satunya adalah pengaruh oleh politik sektarian yang digaungkan oleh berbagai kalangan yang berkepentingan. Hasil dari penelitian Parmudi (2015) ini adalah bangkitnya civil society diperlukan adanya seorang pemimpin yang mampu memberikan dorongan untuk civil society itu sendiri agar melakukan pendewasaan agar dalam kehidupan sosial masyarakat terbebas dari sentimen juga dapat membantu proses pendewasaan untuk civil society agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi secara mandiri. Civil society yang kuat juga memiliki pengaruh yang besar untuk terwujudnya sebuah negara Demokrasi yang ideal. Oleh karena itu dalam kebangkitan civil society di Indonesia ini seharusnya tidak dinonadi oleh taklid dari salah satu golongan.

Sadikin (2021) mengatakan peran Muhammadiyah dipasca reformasi memiliki peran yang signifikan untuk terbentuknya negara demokrasi pada masa-masa transisi di Negara Kesatuan republik Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa sumbangsih pemikiran peran politik kebangsaan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Amien Rais, Syafii Maarif dan Din Syamsuddin yang banyak berkiprah pada ranah negara dan kebangsaan. Dalam melakukan penelitian ini Sadikin (2021) menggunakan metode kualitatif etnografi dengan cara peneliti melakukan

penelitian kepada sekelompok orang. Perbedaan penelitian Sadikin (2021) dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini tidak memfokuskan kepada beberapa tokoh, tetapi lebih menitik beratkan kepada upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan politik.

Muhibbin & Arangga (2019) melakukan penelitian yang berjudul Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila Melalui Konsep *Ta'awun* Gerakan Muhammadiyah, penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana aktualisasi nilai yang terkandung dalam salah satu sila dalam Pancasila yakni keadilan sosial melalui sebuah konsep *Ta'awun* dalam gerakan Muhammadiyah melalui salah satu amal usahanya yakni Lazismu di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dengan penelitian dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Surakarta.

Muhibbin & Arangga (2019) mengatakan bahwa aktualisasi nilai keadilan sosial itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sosial melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Surakarta. Dalam pelaksanaannya Lazismu Kota Surakarta mengklasifikasikan menjadi empat ranah gerak yakni bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa, bidang sosial dan dakwah dengan melakukan kegiatan pada Idul Adha, bidang pemberdayaan ekonomi ditandai dengan adanya program BU EKA, dan

juga pada bidang kesehatan dan kemanusiaan dengan adanya sebuah layanan ambulan gratis untuk masyarakat.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula Rahman (2018) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan sangat besar dalam meningkatkan kesadaran mengenai partisipasi pemilih pemula dalam kontestansi pemilu juga diimbangi dengan literasi politik yang harus terus diberikan kepada pemilih pemula seperti yang disebutkan oleh N. E. Putri & Mubarak (2020), Ramdhani (2019). Selain melalui pendidikan formal Pahlevi & Amrullohi (2020) menyebutkan memberikan pendidikan politik bisa dengan metode per-emptif dan diberikan kepada masyarakat Desa, metode tersebut sudah dilaksanakan Desa di Daerah Yogyakarta dan terbukti efektif. Karena apabila masyarakat mendapatkan pendidikan politik dengan baik maka kesadaran akan partisipasi dalam pemilu akan tumbuh secara sendirinya sebagaimana yang disebutkan oleh Triono (2017).

Beberapa cara dapat digunakan sebagai wadah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini berfokus kepada melalui pendidikan formal yakni melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA dan SMK Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai *civil society organization* yang memiliki banyak amal usaha disektor pendidikan ini menggunakan sekolahan yang dimiliki untuk memberikan pemahaman politik kepada peserta didiknya.

1.6. Kerangka Teori

Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Hegemoni berasal dari bahasa Yunani yakni *eugemonia* yang dapat diartikan sebagai dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota secara individual. Patria & Arief (1999) menyebutkan bahwa contoh dari negara Hegemoni ini terjadi pada kota Athena dan Sparta kepada negara-negara yang sejajar, apabila melihat pada konteks masa kini negara Hegemoni ini dapat dilihat pada negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan juga Uni Soviet pada saat terjadinya perang dingin. Konsep Hegemoni ini pertama kali dicetuskan oleh seorang Marxis dari Rusia yakni Plekanov pada tahun 1880 guna untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar.

Teori Hegemoni Gramsci ini muncul untuk menjawab dua persoalan yakni revolusi Italia dan tafsiran dari pemikiran Marx pasca meninggalnya Karl Marx. Hegemoni memiliki elaborasi kepada suatu hal yakni dominasi dan kepemimpinan yang memiliki tiga garis besar yakni dominasi kepada seluruh musuh juga kepemimpinan kepada sekutu, kepemimpinan pra kondisi yang bertujuan untuk mengalahkan aparat serta dominasi terus berlanjut. Hegemoni ini tercipta karena adanya sebuah institusi yang menggiring secara langsung maupun tidak langsung opini masyarakat kepada sebuah kerangka tertentu yang sudah disiapkan.

Teori Hegemoni Gramsci ini menyatakan bahwa seorang pemimpin atau pangeran dalam melakukan kepemimpinannya akan bersifat tiran atau

tidak itu dipengaruhi oleh kemampuan aktor pemimpin itu tersendiri. Karena apabila menjadi seorang pemimpin maka akan dihadapkan dengan dua kelompok yang saling bertolak belakang, yakni kelompok bangsawan dan kelompok sosial. Kelompok bangsawan ini adalah kelompok yang memiliki keinginan untuk memerintah dan juga mendominasi dengan kondisi yang mereka miliki, sedangkan kelompok rakyat ini adalah kelompok yang justru memiliki keinginan untuk tidak diperintah serta tidak didominasi.

Gramsci menyatakan bahwa didalam suatu kelompok masyarakat pasti akan ada kelompok yang memerintah serta ada kelompok yang diperintah. Berawal dari itu maka apabila seorang pemimpin dapat memerintah dengan baik dan efektif maka hal tersebut akan memunculkan minimnya resistensi yang terjadi dimasyarakat yang diperintah juga dikelompok yang memerintah akan menimbulkan sifat yang taat dari kelompok yang memerintah.

Dominasi yang dilakukan oleh kelompok yang mendominasi kepada kelompok-kelompok yang didominasi ini diawali dari sebuah konsep dominasi yang diberi nama dominasi melalui konsensus. Menurut Gramsci ada dua hal yang menjadi permasalahan pokok tentang hegemoni melalui konsensus yakni melalui pendidikan disatu pihak serta mekanisme kelembagaan. Tenaga pendidik tidak akan pernah memberikan siswa untuk berpikir secara kritis dan sistematis, serta dilain pihak seperti sekolah, gereja, partai politik adalah sebuah sarana untuk kelompok yang berkuasa

untuk menggiri opini menuju ideologi yang didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini menggiring opini menuju ideologi tertentu dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah yang dalam pembelajarannya sudah disiapkan sistematika tertentu agar pemahaman peserta didik mengarah kepada hal-hal yang sudah disiapkan oleh kelompok yang mendominasi.

Gramsci menyebutkan bahwa ada tiga tingkatan dalam hegemoni ini, yang pertama adalah Hegemoni Integral, Hegemoni Integral ini biasanya ditandai dengan adanya sebuah afiliasi masyarakat yang penuh. Masyarakat menunjukkan bahwa adanya sebuah kesatuan antara yang memerintah serta yang diperintah dengan adanya sebuah kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Kedua adalah Hegemoni yang merosot, bahwa adanya sebuah sistem yang telah mencapai kebutuhannya tetapi dari sisi masyarakat tidak benar-benar selaras dengan hal tersebut sehingga menyebabkan integrasi budaya dan politik mudah hancur. Yang ketiga adalah hegemoni minimum, hegemoni ini bersandar pada salah satu ideologis(ekonomi, politik, dan intelektual) yang juga tidak mau mendapat campur tangan oleh kelompok yang lain. Dengan demikian hegemoni ini tidak mau untuk menyesuaikan aspirasi-aspirasi dan kemauan dari kelompok lain.

Teori Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (1994) menyebutkan yang dikutip dalam Nu'man & Zulaifah (2003) partisipasi politik merupakan sebuah kegiatan dari warga negara biasa (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dari definisi ini Huntington dan Nelson (1994) memberi catatan akan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. *Pertama*, partisipasi politik hal yang mencakup kegiatan-kegiatan, jadi tidak hanya sikap saja. Hal tersebut berarti, bahwa partisipasi politik bukanlah identik dengan orientasi warga negara terhadap politik. *Kedua*, partisipasi politik adalah kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara biasa.

Hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Budiardjo, M. (2003) bahwa menurutnya partisipasi politik ini adalah dapat difokuskan tentang segala kegiatan yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, walaupun fokusnya lebih luas. Partisipasi politik ini adalah sebuah kegiatan yang aktif dalam kegiatan aktif dalam politik tersebut seperti menjadi pimpinan negara, mempengaruhi kebijakan. Hal tersebut mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengikuti rapat-rapat, melakukan lobbying kepada pengampu kebijakan. Memberikan suara dalam pemilihan umum ini merupakan salah satu contoh yang nyata tentang partisipasi politik, karena dalam pemilihan umum akan mempengaruhi bagaimana dan siapa yang akan memimpin negara dalam waktu tertentu. Budiardjo, M. (2003) menambahkan definisi partisipasi

politik menurut salah satu tokoh tentang partisipasi yakni Herbert McClosky. Bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat sukarela dalam lingkup pengambilan bagian dari proses pergantian penguasa baik secara langsung maupun secara tidak langsung, juga dalam kegiatan pembentukan kebijakan umum.

Definisi partisipasi politik ini sangat jelas bahwa partisipasi politik ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat, karena apabila masyarakat semakin sadar bahwa diperintah maka mereka akan semakin sadar untuk mendesak untuk diberikan hak untuk bersuara dalam proses pengambilan kebijakan maupun dalam menjalankan roda pemerintahan. Di negara-negara yang menganut konsep demokrasi definisi partisipasi politik ini juga merupakan wujud dari pengejawantahan konsep atau definisi dari demokrasi bahwa kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat.

Didalam negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi umumnya melakukan penilaian apabila tingkat partisipasi politik dari masyarakat tinggi berarti hal tersebut memiliki kondisi yang cukup baik. karena dinilai bahwa masyarakat masih memiliki perhatian serta memahami dan mengikuti kondisi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Sedangkan sebaliknya apabila tingkat partisipasi politik masyarakat dalam negara demokrasi rendah maka hal tersebut dianggap merupakan hal yang tidak baik karena masyarakat mulai acuh tak acuh terhadap kondisi dan masalah yang terjadi pada negaranya. Hal tersebut juga beriringan dengan

ditakutkannya aspirasi-aspirasi masyarakat sudah tidak lagi menjadi prioritas utama untuk ditindak lanjuti dan pemerintah akan lebih mengutamakan kepentingan beberapa kelompok saja.

Teori Kewarganegaraan

Kewarganegaraan menurut Putri (2012) adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memerintah dan juga diperintah, dalam kewarganegaraan ini loyalitas menjadi sebuah prasyarat. Kewarganegaraan tidak bisa lepas dari sebuah perdebatan klasik dari para libertarian dan komuni-tarianisme dengan diantara mereka memiliki sudut pandang dan ciri khas dalam membedah citizenship. Van Gusteren (dalam Bart, 1996) memberikan sebuah pernyataan bahwa kewarganegaraan berkaitan dengan hak-hak di satu sisi, dan pada sisi lainnya juga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban.

Warganegara dalam realitas menurut Putri (2012) merupakan masyarakat yang terkumpul dalam suatu kelompok yang bersifat resmi. Kelompok ini berada dalam sebuah arus kebijakan kesejahteraan tetapi tidak dapat meraih sebuah kehidupan yang mandiri. Walzer dalam Putri (2012) menyatakan bahwa warganegara ini sifatnya seperti klien pasif negara yang tidak bisa membantu dirinya sendiri ataupun saling membantu antara masyarakat.

Model kewarganegaraan di Indonesia dapat dikategorikan memiliki sumber dari nalar liberal. Hal ini (praksis liberal) akan menjadi sebuah

permasalahan apaabila bertentangan sosio-kultural adalah komunitarianisme. Asumsi-asumsi liberal berhadapan dengan konteks komunitarian (Putri, 2012). Pendidikan kewarganegaraan memiliki sebuah peranan penting dalam membentuk kepribadian warga negara yang memiliki moralitas yang mulia, memiliki jiwa tanggung jawab yang besar yang itu juga selaras dengan 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga komitmen Bhineka Tunggal Ika.

Teori Civil Society Tocquenville

Menurut Tocquenville Civil Society merupakan sebuah entitas yang hadir untuk menjadi penyeimbang dari kekuatan negara. Berbeda dengan pandangan dari Hegel mengenai Civil Society yang cukup pesimis, Tocquenville sendiri memiliki pandangan yang lebih positif terhadap Civil Society. Menjadi penyeimbang dari kekuatan negara bukan berarti Civil Society antipati terhadap negara itu sendiri, tetapi Civil Society memiliki sebuah hak otonomnya sendiri dan juga memiliki sebuah kapasitas politik yang tinggi sehingga dapat menjadi penyeimbang dari kekuatan negara yang apabila kekuatan dari negara ini tidak ada penyeimbangannya maka akan besar kemungkinan bahwa negara akan melakukan intervensi yang cukup dalam pada tataran masyarakat Navilda, L. (2022).

Dalam pendekatan dari Tocquenville ini didasarkan pada sebuah penguatan terhadap organisasi-organisasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah atau *Non Government Organization (NGO)* pada tataran masyarakat yang memiliki tujuan untuk membangun *civic culture* agar dapat menumbuhkan jiwa demokrasi pada masyarakat. Dalam implementasinya Civil society ini bergerak dengan menggunakan beberapa prinsip yakni toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, swadaya, otonom, dan konstitusionalisme. Konsepsi Civil Society contohnya adalah masyarakat yang mandiri yang hidup secara berkelompok dengan dapat mengatur apa yang dibutuhkannya. Disisi lain negara tidak dapat melakukan intervensi yang jauh terhadap tatanan masyarakat ini, tetapi bukan berarti negara sudah tidak dibutuhkan, negara dibutuhkan untuk membentuk peraturan-peraturan yang legal, kekuatan dari pemerintah ini juga harus diminimalisir agar monopoli kekuasaan tidak dapat terlaksana.

Muhammadiyah merupakan salah satu Civil Society Organization di Indonesia yang sudah berdiri sejak 18 November 1912. Apabila melihat dari teori Civil Society dari Tocquenville ini bahwa Civil Society merupakan sebuah entitas yang menjadi penyeimbang dari kekuatan negara, maka Muhammadiyah sebagai salah satu Civil Society Organization terbesar di Indonesia harus bisa menjadi penyeimbang dari kekuatan negara, terlebih melihat kondisi politik dari Indonesia yang sangat rampingnya oposisi. Muhammadiyah dalam menjadi entitas penyeimbang negara adalah

Muhammadiyah cukup banyak terlibat dalam beberapa aksi seperti advokasi, kemanusiaan, hingga aksi kritis didalam melakukan hubungan dengan negara Indonesia. Salah satu contoh nyata Muhammadiyah dalam melakukan perannya sebagai entitas penyeimbang negara adalah dengan melakukan aksi Jihad Konstitusi pada masa kepemimpinan Din Samsudin. Jihad konstitusi ini merupakan salah satu upaya Muhammadiyah dalam mengembalikan arah bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

1.7. Definisi Konseptual

1. Civil Society : Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka Civil Society dapat diartikan sebagai masyarakat sipil atau masyarakat madani, tetapi arti tersebut belum dapat mewakili seluruh makna yang terkandung dalam konsep Civil Society tersebut. Oleh karena itu untuk definisi yang lebih spesifik lagi John Locke menyebutkan bahwa civil society merupakan masyarakat politik yang merupakan hasil dari kontrak sosial.
2. Kewarganegaraan: Kewarganegaraan ini sendiri mungkin bisa diartikan dengan tempat seseorang lahir dan menetap, tetapi hal tersebut masih tidak cukup untuk mengartikan kewarganegaraan itu sendiri. Aristoteles menyatakan bahwa warga negara itu akan lebih tepat bahwa

ditentukan oleh rezim konstitusi atau pada bentuk pemerintahannya. Jadi warga negara ditentukan oleh bentuk pemerintahan. Konstitusi menentukan siapa yang menjadi warganegara.

3. Pendidikan Politik : Pendidikan politik merupakan sebuah pembelajaran yang memberikan pemahaman mengenai politik. Pendidikan politik ini memiliki andil besar dalam mewujudkan warga negara yang baik, dikarenakan politik juga merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Apabila tidak adanya pendidikan politik yang baik akan menyebabkan banyaknya warga negara yang apatis terhadap politik yang akan berdampak kepada minimnya partisipasi politik sehingga akan semakin sulit juga untuk tercapainya negara demokrasi yang ideal.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian penting dalam penelitian ini, pada definisi operasional ini menurut Sugiyono (2015) dalam Al-Hamdi et al (2020) adalah penetapan ciri yang akan dipelajari sehingga akan menjadi variable yang bisa diukur. Dalam penelitian ini definisi operasionalnya adalah factor kepemimpinan dan dominasi terhadap pendidikan politik kepada siswa.

Tabel 1. 1 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Alat Ukur
Variabel Faktor Dominasi	Dominasi <i>State</i>	Apakah ada sebuah upaya pengarahan pemahaman politik kewarganegaraan kepada kerangka tertentu yang sudah disiapkan sebelumnya melalui mata pelajaran?
	Dominasi <i>Civil Society</i>	Bagaimana peranan <i>Civil Society</i> dalam memberikan pemahaman politik dan kewarganegaraan dalam perspektif Civil Society untuk mengatisipasi Hegemoni dari Negara?
Variabel Faktor Kepemimpinan	Ketertarikan Politik	Bagaimana pengaruh aktor pemimpin terhadap ketertarikan siswa kepada politik?
	Kebijakan Pendidikan Politik	Apakah ada sebuah kebijakan yang mengharuskan untuk siswa SMA sedrajat mendapatkan pendidikan politik melalui pendidikan formal?

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Studi Kasus. Dengan pendekatan studi kasus ini teknik pengumpulan datanya

menggunakan wawancara untuk mendapatkan data primer serta teknik dokumentasi untuk data sekunder. (Al-Hamdi et al., 2020) penelitian jenis ini mengarah kepada bagaimana dan sejauh apa pemahaman politik siswa SMA dan SMK Muhammadiyah di Kecamatan Bantul yang tentunya sebagai sekolahan dari Muhammadiyah yang berbasis civil society memberikan pendidikan politik yang tentunya juga akan berdampak ketika para siswa berhadapan dengan kontestansi Pemilu pada tahun 2024 serta berkaitan juga dengan masa depan demokrasi di Indonesia.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Bantul, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Bantul, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Bantul.

1.9.3. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, yang mana data primer ini adalah sebuah data yang didapatkan secara langsung melalui beberapa teknik pengumpulan data. Penelitian ini untuk mendapatkan data primer ini menggunakan teknik

Tabel 1. 2 Data Primer

NO	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Model pendidikan politik kewarganegaraan di SMA Muhammadiyah 1 Bantul	Guru PPKn SMA Muhammadiyah 1 Bantul	Wawancara
2	Model pendidikan politik kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul	Guru PPKn Siswa SMK Muhammadiyah 1 Bantul	Wawancara
3	Model pendidikan politik kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 2 Bantul	Guru PPKn Siswa SMK Muhammadiyah 2 Bantul	Wawancara
4	Dampak pendidikan politik kewarganegaraan di SMA Muhammadiyah 1 Bantul	Siswa SMA Muhammadiyah 1 Bantul	Wawancara
5	Dampak pendidikan politik kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul	Siswa SMK Muhammadiyah 1 Bantul	Wawancara
6	Dampak pendidikan politik kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 2 Bantul	Siswa SMK Muhammadiyah 2 Bantul	Wawancara
7	Upaya yang dilakukan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Bantul dalam memberikan pendidikan politik	Ketua Majelis Dikdasmen PDM Bantul	Wawancara

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari wawancara, observasi maupun teknik lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer sehingga dapat menunjang penelitian ini.

Tabel 1. 3 Data Sekunder

NO	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Silabus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Guru PPKn SMA Muhammadiyah 1 Bantul	Dokumentasi
2	Silabus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Guru PPKn SMK Muhammadiyah 1 Bantul	Dokumentasi
3	Silabus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Guru PPKn SMK Muhammadiyah 2 Bantul	Dokumentasi

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015) yang dikutip dalam Al-Hamdi et al., (2020) pengumpulan data merupakan sebuah langkah teknis strategis untuk mendapatkan data yang digunakan untuk penelitian karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data yang nantinya akan dianalisa.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara ini bisa dikatakan sebagai bentuk interaksi antara pewawancara dengan yang diwawancarai, dengan perkembangan teknologi seperti saat ini proses wawancara dapat dilakukan secara langsung (luring) maupun secara jarak jauh (daring) dengan menggunakan media sosial seperti Call WA, Zoom, dan aplikasi sejenisnya (Al-Hamdi et al., 2020). Pada wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini dilakukan di SMA dan SMK Muhammadiyah di Kecamatan Bantul dengan respondennya dari para guru dan juga siswa. Jumlah data yang diperlukan untuk penelitian ini 15 orang siswa dari SMA Muhammadiyah 1 Bantul, 20 orang siswa dari SMK Muhammadiyah 1 Bantul, dan 10 orang siswa dari SMK Muhammadiyah 2 Bantul, dan juga masing-masing 1 guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari masing-masing sekolah. Dengan menggunakan teknik wawancara ini diharapkan akan mendapatkan data dari pengalaman para responden yang akan melihat kondisi asli yang terjadi dilapangan.

Teknik pengumpulan yang selanjutnya adalah dokumentasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang bersifat dokumen seperti silabus pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan juga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

1.9.5. Teknik Analisa

Teknik analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk- bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Menurut Sugiyono (2015) dalam Al-Hamdi et al (2020) setidaknya ada empat langkah dalam melakukan analisis data, yakni :

A. Pengumpulan dan pengelolaan data

Pengumpulan data ini merupakan tahap pertama dalam dalam analisis. Setelah selesai melakukan pengumpulan data maka tahap yang dilakukan setelahnya adalah melakukan pengelolaan data yang telah didapat. Pada tahap ini juga dilakuakn proses menyalin hasil pengumpulan data melalui wawancara yang berbentuk rekaman menjadi sebuah tulisan, proses ini biasa disebut dengan proses transkrip data. Setelah berbentuk tulisan kemudian memilah dan memilih data yang sesuai dengan indikator penelitian.

B. Reduksi data

Proses ini merupakan proses untuk seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang tentunya masih kasar. Reduksi data dilakukan selama penelitian baik dari penelitian di lapangan maupun hingga sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari

analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.

C. Penyajian Data

Data dan informasi yang didapat di lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks, data disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

D. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.